

PENGARUH KETERBUKAAN INFORMASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP GOOD GOVERNANCE PADA KANTOR CAMAT SAKO KOTA PALEMBANG

Oleh :

Nama : Estri Rahayu

Nim : 20.11.113

Program Studi : Administrasi Negara

ABSTRACT

ESTRI RAHAYU, 2024, The Influence of Information Openness and Community Participation on Good Governance at the Sako Subdistrict Office, Palembang City. Public Administration Study Program at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA). Main Supervisor (I) Mr. Dr. Supardi, S.Sos., M.Si and Assistant Supervisor (II) Mrs. Citra Iasha, S.Psi., M.Si.

The aim of this research is to determine the influence of information openness and community participation on good governance at the Sako sub-district office, Palembang City. This research contains three variables, namely independent information disclosure (x1), community participation (x2) and dependent Good Governance (Y). This research uses quantitative research methods. The population of this study was the community and staff of the Sako sub-district office, Palembang city, with a population of 877 people. During 3 months of observation, the source was data from the Sako sub-district office, Palembang city, and the sample obtained in this study was 90 respondents using the Slovin formula. The sampling technique is using random sampling. The data analysis techniques used consist of normality test analysis, validity test, reliability test, multiple linear regression test, t test, f test and coefficient of determination test with the help of the SPSS version 22 software test tool.

The hypothesis in this research shows that if the sig value is $0.037 < 0.05$ then H_0 is rejected and the calculated t value is $2.113 < t$ table 6.096. So based on these assumptions, it is certain that there is influence and significance on the independent variable Information Openness on Good Governance (Y).

It is known that the t table value is 5.104 which is obtained from the t table value (attached). Then it is known from the results of the partial regression significance test (t test) that the sig value of the variable X2 (Community Participation) is if the sig value. $0.018 < 0.05$ and the calculated t value means H_a is accepted as $2.415 < t$ table 5.104, so it is certain that there is a positive and significant influence on the independent variable Community Participation (X2) on Good Governance (Y). The coefficient of determination shows that the R2 test result is 0.169. This shows that the implementation of Good Governance is able to contribute to the information disclosure variable by 16.9%. The results of the multiple linear regression test have a positive constant value of 7,304, which shows that the positive influence of the regression coefficient value for the Information Openness variable (x1) is positive, namely 0.202. then for every additional value of 1 unit on the Information Openness variable (x1), the regression coefficient value of the Community Participation variable (x2) is positive, namely 0.249. This number means that every additional value of 1 unit on the Community Participation variable (x2).

Based on the results obtained in this research, it can be concluded that the R2 test results are 0.169. This shows that the implementation of Good Governance is able to contribute to the variables of information openness and community participation by 16.9%.

Keywords: Effect of Information Openness, Community Participation on Good Governance

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Good governance merupakan elemen kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan pemerintahan yang efektif. Keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat adalah unsur utama dalam praktik good governance. Transparansi, terutama melalui keterbukaan informasi, dianggap sebagai landasan demokrasi yang kuat. Masyarakat yang terinformasi memiliki kapasitas yang lebih baik untuk berpartisipasi

dalam proses pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang baru untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui platform daring dan media sosial. Kantor Camat sebagai lembaga pemerintahan tingkat kecamatan memiliki peran sentral dalam menyediakan pelayanan publik dan berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Adanya potensi keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi dari Kantor Camat dapat menghambat partisipasi, menciptakan ketidak-

setaraan, dan mempengaruhi efektivitas *good governance*. Apabila partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pelayanan publik di Kantor Camat Sako rendah, ini dapat mengindikasikan perlunya peningkatan keterbukaan informasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dengan meningkatkan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat, Kantor Camat Sako memiliki peluang untuk mendapatkan masukan yang berharga dari masyarakat, memperbaiki proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam suatu negara ditujukan untuk mengoptimalkan tujuan nasional sehingga dapat melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan kinerja pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Kepentingan membuat adanya karakteristik tersebut dalam menjalankan fungsi administratif pemerintah baik pusat maupun daerah dilakukan secara terbuka oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terwujudnya prinsip *good governance* dapat memberikan birokrasi pemerintah yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan pelayanan publik di berbagai sektor.

Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti belum ditemukannya adanya indikasi permasalahan yaitu :

1. Masih ada keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi mungkin menjadi hambatan dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat di Kecamatan Camat Sako.
2. Masih ada yang belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk terlibat langsung dalam beberapa program-program seperti Program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, bimbingan usaha kecil menengah (UKM), atau program keuangan inklusif.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : **"Pengaruh Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap *Good Governance* pada Kantor Camat Sako Kota Palembang"**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besarkah Pengaruh Keterbukaan Informasi terhadap *Good Governance* pada Kantor Camat Sako Kota Palembang?

2. Seberapa besarkah Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap *Good Governance* pada Kantor Camat Sako Kota Palembang?
3. Seberapa besarkah pengaruh keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat terhadap *Good governance*?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keterbukaan informasi terhadap *Good governance* pada Kantor Camat Sako kota Palembang
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap *Good governance* pada Kantor Camat Sako Kota Palembang.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keterbukaan informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap *Good governance* pada Kantor Camat Sako kota Palembang.

Hipotesis

Hipotesis penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif, Sugiyono (2013:77) mengemukakan bahwa hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemungkinan jawaban dari rumusan masalah ada di penelitian ini adalah:

Hipotesis nol (H₀)

Di duga tidak ada Pengaruh keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat terhadap *Good Governance* di Kantor Camat sako, Kota Palembang.

Hipotesis alternative (H_a)

Diduga terdapat pengaruh antara keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat terhadap *Good Governance* di Kantor Camat Sako, Kota Palembang

Kriteria Penguji Hipotesis

Adapun penguji hipotesis yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji t sebagai berikut :

1. Uji t (Parsial)

Menurut Sugiyono (2018:223), uji t atau uji parsial merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, yakni menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Untuk menguji signifikan hubungan antara variabel bebas, kualitas keterbukaan X₁, partisipasi masyarakat X₂, variabel terikat *Good Governance* Y, maka peneliti menggunakan rumus Uji t (Sugiyono, 2019:248) sebagai berikut :

$$t \text{ hitung} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = nilai t hitung

r = koefisien korelasi (x) dan (y)

n = jumlah sampel

2. Uji F (Simultan)

Menurut Situmorang (2014:116), uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak dengan nilai alpha = 0,05 (5%). Kriteria pengujian adalah :

1) $H_0 : b_1 = 0$, artinya secara serentak tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

2) $H_0 : b_1 \neq 0$, artinya secara serentak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusannya : H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$ H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$.

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015:1045), pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Menurut Yosin (2012:1), Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu. Menurut surakhmad (1982:7), Pengaruh adalah.

Pengertian Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi publik merupakan komponen penting dari pemerintah yang demokratis dan efektif. Hal ini juga merupakan alat penting untuk mengawasi kebijakan publik. Kebebasan informasi adalah hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan komponen penting dari administrasi pemerintahan yang efektif.

Menurut Krina dalam Hanifah dan Praptoyo (2015:7) prinsip-prinsip keterbukaan dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

- Mekanisme sistem keterbukaan informasi
- Mekanisme informasi sektor publik
- Penyebaran informasi publik

UU 14 Tahun 2008 berlaku diseluruh wilayah Indonesia, sehingga segala hak dan kewajiban masyarakat terhadap informasi publik dan

pengguna informasi publik serta badan publik ditingkat pusat, provinsi, dan kota/kabupaten diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diberi kesempatan untuk menjamin keterbukaan informasi publik di daerah untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah dengan undang-undang.

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

Dalam pasal 3 bertujuan untuk :

- Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik.
- Mempromosikan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan.
- Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan publik yang sehat.
- Menyelenggarakan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, serta akuntabel dan akuntabel.
- Memahami motivasi dibalik kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan generasi muda bangsa.
- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Indikator Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008. Terdapat beberapa indikator keterbukaan Informasi publik antara lain ;

- Mekanisme sistem keterbukaan informasi.
- Mekanisme informasi sektor publik
- Penyebaran Informasi publik.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik di daerah kota maupun pedesaan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di desa menjadi satu keharusan mengingat bahwa desa adalah tonggak pembangunan nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan menyebutkan bahwa peran serta masyarakat adalah untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pendapat tersebut maka disimpulkan bahwa jika partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan

kebijakan dan pengambilan keputusan maka di dalam berbagai bidang kehidupan akan mempengaruhi cara masyarakat dalam bertindak.

Prinsip-prinsip Partisipasi

Solekhan (2014:153) mengatakan bahwa pengembangan partisipasi masyarakat itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Berbagai faktor budaya, sosial, ekonomi dan politik sangat berpengaruh yang menyebabkan formalisasi partisipasi menjadi sangat bervariasi satu sama lain. Artinya, tidak ada satu formalisasi yang baku tentang konsep partisipasi.

Indikator Partisipasi Masyarakat

Ada tiga indikator partisipasi masyarakat menurut Marschall (2006) :

1. Adanya suatu kelompok-kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat,
2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses,
3. Adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Landasan Hukum Good governance

Berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi landasan implementasi *Good governance* adalah:

1. Sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000, tentang Diklat jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menetapkan salah satu mata diklat yaitu; Dasar-dasar pemerintahan yang baik (*Good governance*).
2. Pasal 20 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengatur asas Umum Penyelenggara Negara yang baik.
3. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
4. UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
5. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
7. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa pemerintah.
9. Peraturan Menteri No. Kep-/M-BU/2002 Tahun 2002 Tentang Penerapan Praktek *Good governance*. Undang-undang diatas mengatur tentang pemeritahan yang baik (*Good*

governance) sesuai dengan prinsip-prinsip *Good governance*.

Prinsip-prinsip Good Governance

Menurut united nation development program (UNDP) yang dikutip oleh sedarmayanti (2012:13) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam tata Kelola pemerintah yang baik (*Good governance*) adalah sebagai berikut :

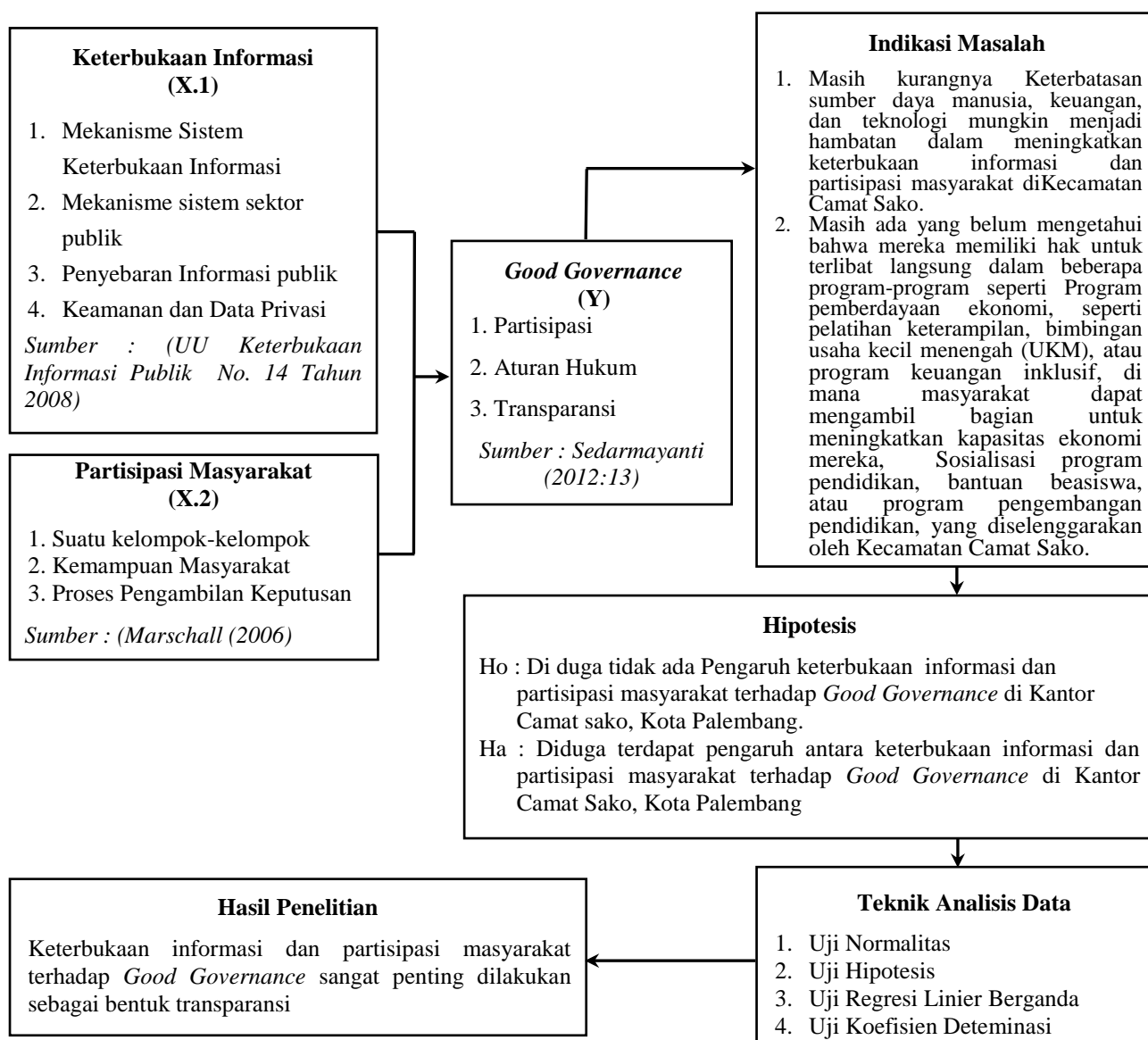
1. Partisipasi (*participation*)
Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktur.
2. Aturan Hukum (*rule of law*)
Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan yang berkeadilan dan dilaksanakan secara utuh, terutama tentang hak asasi manusia.
3. Transparansi
Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses,.
Asas *Good Governance* menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 tentang Asas Penyelenggaraan Pemerintahan.
 1. Kepastian Hukum
 2. Tertib Penyelenggaraan Negara
 3. Kepentingan Umum
 4. Keterbukaan
 5. Proporsionalitas
 6. Profesionalitas
 7. Akuntabilitas
 8. Efisiensi
 9. Efektivitas

Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman pemahaman yang lainnya. Sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. (Sugiyono, 2013: 60)

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen (Sugiyono, 2019:95)

Bagan Kerangka Berpikir



C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2011: 8) yaitu : “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu yang menjadi objek pengamatan penelitian, sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti (Kerlinger, 2012:49). Adapun Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus predictor, dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat), Sugiyono (2016: 39).

2. Variabel Terikat

Variabel Dependen sering disebut sebagai variabel output, criteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas, Sugiyono (2016: 38).

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas, dalam penelitian ini variabel terikat adalah *good governance* (Y).

adanya definisi operasional maka akan memperjelas ruang lingkup dari variabel penelitian dan tidak membingungkan. Definisi operasional untuk membatasi ruang lingkup atau pengertian variabel-variabel yang diamati atau diteliti mengarahkan pada pengukur pengamatan terhadap variabel-variabel yang bersangkutan serta pengembangan instrument/alat ukur (Notoadmodjo, 2015: 12). Dalam penelitian ini, definisi operasional nya adalah sebagai berikut :

Variabel keterbukaan informasi (X1), partisipasi masyarakat (X2) dan *good governance* (Y).

Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk mempermudah dalam pengambilan data. Dengan

Tabel Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator	No Pernyataan
1	Keterbukaan Informasi (Variabel X.1) Sumber: UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008)	1. Mekanisme sistem keterbukaan informasi.	Pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan akses dan distribusi informasi secara luas.	1
		2. Mekanisme informasi sektor publik	Ketersediaan dan aksesibilitas situs web resmi atau portal informasi yang menyediakan informasi publik secara komprehensif.	2
		3. Penyebaran Informasi publik. (UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008)	Ketersediaan saluran atau sarana yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi.	3
2	Partisipasi masyarakat (Variabel X.2) Sumber : Marschall (2006)	1. Suatu Kelompok- Kelompok	Penilaian terhadap kontribusi positif yang diberikan oleh organisasi kepada masyarakat atau lingkungan.	4
		2. Kemampuan Masyarakat	Kemampuan masyarakat dalam keikut sertaan masyarakat terhadap kebijakan organisasi	5
		3. Proses Pengambilan Keputusan.	Kejelasan dan transparansi dalam langkah-langkah yang diambil selama proses pengambilan keputusan	6
3	Good governance (Y) Sumber : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	1. Partisipasi masyarakat	Ketaatan masyarakat untuk kebebasan berkumpul, mempunyai suara dalam pengambilan keputusan dan mengungkap-kan pendapat, serta kepastian berpartisipasi secara konstruktur.	7
		2. Tegaknya Supermasi Hukum	Ketaatan hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia dalam kerangka hukum harus adil.	8
		3. Transparasi	Ketaatan dalam keterbukaan transparan di bangun atas dasar arus informasi yang bebas.	9

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya (Sugiyono, 2019:126). Populasi merupakan wilayah generalisasi dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan

diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah staff pegawai kantor Kecamatan Sako Kota Palembang dan warga masyarakat yang berjumlah 877 orang. Dari data per 3 bulan terakhir, Oktober, November, Desember masyarakat yang berkunjung di Kantor Camat Kecamatan Sako 2023.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2015:116) sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang telah mendapatkan jumlah sesuai dengan karakteristik yang diterapkan oleh peneliti. Bila populasi besar, penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel kesimpulannya akan dapat diperlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Penetapan sampel yang

digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis metode random sampling. Teknik penarikan sampel dengan jenis layanan, tujuan survey dan data yang ingin diperoleh. Untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan rumus slovin dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(\alpha)^2}$$

$$n = \frac{877}{1 + 877(0,1)^2}$$

$$n = \frac{877}{1 + 8,77}$$

$$n = \frac{877}{9,77}$$

$n = 89,7$ disesuaikan oleh peneliti menjadi 90

Berdasarkan perhitungan diatas, sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini disesuaikan menjadi 90 dari keseluruhan orang yang ada di Kantor Kecamatan Sako Kota Palembang.

Tabel Sampel Responden Berdasarkan Status Sosial

No.	Status Sosial	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pegawai Negeri Sipil	13	17	30 Orang
2.	Pegawai Honorer	8	12	20 Orang
3.	Masyarakat	18	22	40 Orang
TOTAL				90 Orang

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden dalam penelitian ini adalah 90 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 30 orang (13 laki-laki dan 17 perempuan), Pegawai Honorer sebanyak 20 orang (8 laki-laki dan 12 perempuan) dan Masyarakat sebanyak 40 orang (18 laki-laki dan 22 perempuan).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Sugiyono (2021: 296), yang dikutip dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan tahap yang paling penting dari setiap proyek penelitian karena pengumpulan data adalah tujuan utama dari semua penelitian. tanpa mengetahui metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang mematuhi standar data yang ditetapkan

Penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh secara lisan dan tertulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana mereka saksikan selama penelitian. Teknik ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara

langsung lokasi penelitian atas gejala-gejala yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti, sehingga melalui proses ini penulis berusaha mendapatkan data yang dibutuhkan.

2. Kuesioner

Kuisoner atau Angket Menurut Sugiyono (2017:142) “Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Instrument penelitian ini menggunakan alat ukur skala bertingkat dengan 5 skala pengukuran atau dengan 5 alternatif jawaban, yaitu SS = Sangat Setuju, S = Setuju, RR = Ragu-ragu, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju, berikut ini tabel yang menunjukkan skala bobot penilaian yang digunakan.

Tabel Skala Bobot Penilaian

No	Kriteria Penilaian	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Ragu-ragu (RR)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka Menurut Sujarweni (2015:157) “Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literatur terkait dan sumber-sumber lain yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini”.

4. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”

Teknik Uji Coba Instrumen

Validitas dan reliabilitas suatu penelitian sangat bergantung pada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tersebut. Validitas instrumen adalah tingkat ketetapan intrumen yang digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur dalam suatu penelitian, sementara reliabilitas instrument adalah digunakan untuk mengukur berkali-kali dan menghasilkan data yang sama.

1. Pengujian Validitas Instrumen

Uji validitas instrument digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. “Uji validitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor,” Ghozali dalam Posaina (2013:23-24).

Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan ketentuan 100 sampel.

- Jika r hitung $> 0,194$ r tabel, maka item instrument dinyatakan valid
- Jika r hitung $< 0,194$ r tabel, maka item instrument dinyatakan tidak valid

2. Pengujian Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan pengelola data yang dilakukan dengan bantuan program SPSS (*Statistical Program and Service Solution*) versi 20. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reabilitas dengan uji statistik *Cronbach's alpha*.

- Suatu variabel dikatakan reliabel bila koefisien realibilitas Cronbach's alpha $> 0,60$
- Suatu variabel dikatakan tidak reliabel bila koefisien realibilitas Cronbach's alpha $< 0,60$

Teknik Analisis Data

Sugiyono (2018:482) mengemukakan bahwa analisa data merupakan proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun teknik analisa data sebagai berikut :

A. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2021:196) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Rumus yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah rumus Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan data berdistribusi normal jika signifikansi $> 0,05$ dan data tidak berdistribusi normal jika signifikansi $< 0,05$.

B. Uji Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Menurut Sugiyono (2018:223), uji t atau uji parsial merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, yakni menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Untuk menguji signifikan hubungan antara variabel bebas, kualitas keterbukaan informasi X1, partisipasi masyarakat X2, variabel terikat *Good Governance* Y secara masing-masing atau terpisah, maka peneliti menggunakan rumus Uji t (Sugiyono, 2019:248) sebagai berikut :

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = nilai t hitung

r = koefisien korelasi (x) dan (y)

n = jumlah sampel

2. Uji F Uji Simultan

Uji F menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak dengan nilai alpha = 0,05 (5%). Kriteria pengujian adalah :

- $H_0 : b_1 = 0$, artinya secara serentak tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- $H_0 : b_1 \neq 0$, artinya secara serentak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusannya : H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$ $32H_0$ ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$.

Uji Regresi Linier Berganda

Teknik analisis regresi linear berganda menurut Gujurati (2011 : 20) bertujuan untuk mengukur kekuatan (*strength*) atau tingkatan (*degree*) hubungan linear (*linear association*) antar dua variabel. Persamaan regresi linear berganda yang digunakan adalah $Y = a + b_1x_1 + b_2x_2$

Keterangan :

Y = *Good Governance*

X1 = Keterbukaan Informasi

X2 = Partisipasi Masyarakat

a = Konstanta

b1, b2 = Koefisien Regresi

Uji Koefisien Determinasi

Besarnya koefisien determinasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Dimana :

Kd = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien korelasi

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

1. Jika Kd mendeteksi nol (0), maka pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent lemah.
2. Jika Kd mendeteksi satu (1), maka pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent kuat.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis kelamin	jumlah	
		Responden	Persentase (%)
1.	Laki-laki	51	56.7%
2.	perempuan	39	43.3%
		90	100.0%

Berdasarkan tabel diketahui bahwa kondisi responden pada kantor camat kecamatan kota Palembang, yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 51 responden atau 56,7, sedangkan

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan (kuisisioner) yaitu masyarakat yang mendapatkan keterbukaan informasi dikantor camat kecamatan sako kota Palembang. Data yang telah terkumpul akan diolah melalui program *Statistical Packages For the Social Science (SPSS) 22.0 Version* dengan menggunakan pengukuran skala likert.

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat dan staf pegawai yang mendapat keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat terhadap pengaruh *Good Governance* yang ada maka penelitian ini menyebar kuisisioner kepada 90 responden.

1. Karakteristik responden

Karakteristik responden ini diambil dari staff pegawai dan masyarakat yang mendapatkan keterbukaan informasi di kantor camat sako kota Palembang berjumlah 90 orang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kantor camat sako kota Palembang dengan cara menggunakan kuesioner pada responden yang berjumlah 90 orang, maka diperoleh jumlah data untuk memperoleh gambaran yang jelas dari data yang diperoleh dari kuesioner tersebut, dibawah ini disajikan data dalam tabel distribusi sebagai berikut:

Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel sebagai berikut:

responden yang berjenis Perempuan berjumlah 39 responden atau 43,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari klasifikasi responden penelitian mayoritas responden berjenis laki-laki.

Tabel Karakteristik responden berdasarkan usia

No.	Usia	Responden	Jumlah	
			Responden	Persentase (%)
1.	17-20	20		20%
2.	21-30	47		47%
3.	31-45	23		23%
	Jumlah	90		90

Berdasarkan tabel diketahui bahwa responden Pada Kantor Camat Kecamatan Sako Kota Palembang, yang berusia 17-20 tahun sebanyak 20 orang, responden yang berusia 21-30 tahun 47 orang, responden yang berusia 31-45 tahun 23

orang. Adapun usia yang paling mendominasi dalam penelitian ini adalah usia 21-30 tahun.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengukur suatu validitas yaitu menggunakan korelasi person product moment dengan *statistical packages for the social science (SPSS) 22.0 Version*.

Secara statistic, angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan nilai r tabel untuk mengetahui butir yang valid dan tidak valid dengan kriteria pengambilan Keputusan uji validitas jika diperoleh nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada signifikansi 5% maka butir dianggap valid. Sedangkan bila $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka butir tersebut dianggap tidak valid. Berikut hasil uji validitas untuk masing-masing variabel:

Tabel Hasil Uji Validitas Keterbukaan Informasi (X1)

Item Pernyataan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan (nilai $r_{hitung} >$ nilai r_{tabel})
Pernyataan 1	0,789	0,207	valid
Pernyataan 2	0,776	0,207	valid
Pernyataan 3	0,858	0,207	valid

Sumber: output SPSS v 22 (Diolah Peneliti, 2024)

Berdasarkan data diatas maka semua instrument pernyataan dikatakan sesuai hal ini disebabkan taraf $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,207) disimpulkan data dan

variabel keterbukaan informasi dapat digunakan dan valid.

Tabel Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat (X2)

Item Pernyataan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan (nilai $r_{hitung} >$ nilai r_{tabel})
Pernyataan 1	0,647	0,207	Valid
Pernyataan 2	0,828	0,207	Valid
Pernyataan 3	0,836	0,207	Valid

Sumber: output SPSS v 22 (Diolah Peneliti, 2024)

Berdasarkan data diatas maka semua instrument pernyataan dikatakan sesuai hal ini disebabkan taraf $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,207) disimpulkan data dan

variabel Partisipasi Masyarakat dapat digunakan dan valid.

Tabel Hasil Uji Validitas Good Governance (Y)

Item pernyataan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan (nilai $r_{hitung} >$ nilai r_{tabel})
Pernyataan 1	0,612	0,207	valid
Pernyataan 2	0,845	0,207	valid
Pernyataan 3	0,811	0,207	valid

Sumber: output SPSS v 22 (Diolah Peneliti, 2024)

Berdasarkan data diatas maka semua instrument pernyataan dikatakan sesuai hal ini disebabkan taraf $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,207) disimpulkan data dan variabel *Good Governance* dapat digunakan dan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsisten atau tidaknya angket dalam kuesioner penelitian ini. Sebelum dilakukan pengujian reliabilitas harus ada dasar pengambilan Keputusan yaitu Cronbach alpha sebesar 0,60. Variabel dianggap reliabel jika nilai variabel tersebut lebih besar dari 0,60. Jika lebih kecil maka variabel yang diteliti tidak bisa dikatakan reliabel karena lebih kecil dari 0,60. Hasil pengujian reliabilitas pada angket penelitian ini sebagai berikut:

Tabel Uji Reliabilitas Variabel Keterbukaan Informasi

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.730	3

Berdasarkan tabel uji reliabilitas diketahui nilai *Cronbach alpha* sebesar 0,730, disebabkan taraf lebih tinggi 0,60 ($0,730 > 0,60$), sehingga dapat disimpulkan indikator yang digunakan terhadap variabel keterbukaan informasi dapat diterima atau reliabel.

Tabel Uji Reliabilitas Variabel Partisipasi Masyarakat

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.650	3

Berdasarkan tabel uji reliabilitas diketahui nilai *Cronbach alpha* sebesar 0,650, disebabkan taraf lebih tinggi 0,60 ($0,650 > 0,60$), sehingga dapat disimpulkan indikator yang digunakan terhadap variabel Partisipasi Masyarakat dapat diterima atau reliabel.

Tabel Uji Reliabilitas Variabel *Good Governance*

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.613	3

Berdasarkan tabel uji reliabilitas diketahui nilai *Cronbach alpha* sebesar 0,613, disebabkan taraf lebih tinggi 0,60 ($0,613 > 0,60$), sehingga dapat disimpulkan indikator yang digunakan terhadap variabel Partisipasi Masyarakat dapat diterima atau reliabel.

Tabel Informasi yang disediakan oleh kantor camat sako mudah diakses oleh Masyarakat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	1.1	1.1	1.1
	S	43	47.8	47.8	48.9
	SS	46	51.1	51.1	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel diatas yang menunjukkan RR (ragu-ragu) 1,1%, S (setuju) 47,8%, SS (sangat setuju) 51,1%. Artinya Kantor camat sako Kota

Hasil Distribusi Frekuensi Kuesioner

Selanjutnya akan dilakukan proses perhitungan jawaban kuesioner yang berkenaan dengan seluruh pernyataan yang telah lulus uji validitas dengan menggunakan skala *likert*.

Berdasarkan penelitian dari 90 responden yang diteliti, diperoleh hasil penelitian terhadap pengaruh pengaruh Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap *Good Governance* yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

1. Keterbukaan Informasi

Adapun hasil distribusi frekuensi jawaban kuesioner terhadap variabel Keterbukaan Informasi dapat dilihat pada pernyataan dibawah ini:

Palembang sudah memberikan Informasi yang disediakan oleh kantor camat sako mudah diakses oleh Masyarakat

Tabel Informasi yang disediakan oleh kantor camat sako mudah dipahami

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	4	4.4	4.4	4.4
	S	45	50.0	50.0	54.4
	SS	41	45.6	45.6	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel diatas yang menunjukan RR (ragu-ragu) 4,4%, S (setuju) 50,0%, SS (sangat

setuju) 45,6%. Artinya Kantor Camat Sako sudah menyediakan informasi yang mudah dipahami.

Tabel Kantor Camat Sako secara aktif melibatkan Masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan lokal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	12	13.3	13.3	13.3
	S	41	45.6	45.6	58.9
	SS	37	41.1	41.1	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel diatas yang menunjukan RR (ragu-ragu) 13,3%, S (setuju) 45,6%, SS (sangat setuju) 41,1%. Artinya pegawai Kantor Camat Sako secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan lokal.

2. Partisipasi Masyarakat

Adapun hasil distribusi frekuensi jawaban kuesioner terhadap variabel Partisipasi Masyarakat dapat dilihat pada pernyataan dibawah ini:

Tabel Sering Berpartisipasi Dalam Kegiatan Atau Forum Yang Diadakan Oleh Kantor Camat Sako

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	45	50.0	50.0	50.0
	SS	45	50.0	50.0	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel diatas yang menunjukkan S (setuju) 50,0%, SS (sangat setuju) 50,0%. Artinya

masyarakat sering berpartisipasi dalam kegiatan atau forum yang diadakan oleh kantor camat sako.

Tabel Kantor Camat Sako Memiliki Mekanisme yang Efektif untuk Menerima Masukan dan Tanggapan Dari Masyarakat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	1.1	1.1	1.1
	S	56	62.2	62.2	63.3
	SS	33	36.7	36.7	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel diatas yang menunjukkan RR (ragu-ragu) 1,1%, S (setuju) 62,2%, SS (sangat setuju) 36,7%. Artinya Kantor camat sako

memiliki mekanisme yang efektif untuk menerima masukan dan tanggapan dari Masyarakat.

Tabel Kantor Camat Sako Memiliki Mekanisme yang Efektif Untuk Menerima Masukan dan Tanggapan Dari Masyarakat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	12	13.3	13.3	13.3
	S	25	27.8	27.8	41.1
	SS	53	58.9	58.9	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel diatas yang menunjukkan RR (ragu-ragu) 13,3%,S (setuju) 27,8%,SS (sangat setuju) 58,9%. Artinya Kantor camat sako memiliki mekanisme yang efektif untuk menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat.

3. *Good Governance*

Adapun hasil distribusi frekuensi jawaban kuesioner terhadap variabel *Good Governance* dapat dilihat pada pernyataan dibawah ini.

Tabel Keputusan-keputusan yang diambil oleh kantor camat sako bersifat transparan dan dapat dipertanggung jawabkan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	1	1.1	1.1	1.1
	S	46	51.1	51.1	52.2
	SS	43	47.8	47.8	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel diatas yang menunjukkan RR (ragu-ragu) 1,1%, S (setuju) 51,1%,SS (sangat setuju) 47,8%. Artinya Kantor camat sako

memiliki Keputusan-keputusan yang diambil oleh kantor camat sako bersifat transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tabel Kantor camat sako merupakan prinsip-prinsip keadilan dan kebersihan (*fairness and integrity*) dalam setiap aspek operasionalnya

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	3	3.3	3.3	3.3
	S	49	54.4	54.4	57.8
	SS	38	42.2	42.2	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel diatas yang menunjukkan RR (ragu-ragu) 3,3%, S (setuju) 54,4%, SS (sangat setuju) 42,2%. Artinya Kantor camat sako sudah

menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kebersihan (*fairness and integrity*) dalam setiap aspek operasionalnya.

Tabel Partisipasi Masyarakat dihargai dan diintegrasikan dalam kebijakan dan program-program yang diimplementasikan oleh kantor camat sako

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RR	6	6.7	6.7	6.7
	S	39	43.3	43.3	50.0
	SS	45	50.0	50.0	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel diatas yang menunjukkan RR (ragu-ragu) 6,7%, S (setuju) 43,3%, SS (sangat setuju) 50,0%. Artinya partisipasi Masyarakat dihargai dan diintegrasikan dalam kebijakan dan program-program yang diimplementasikan oleh kantor camat sako.

Teknik Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Rumus yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah rumus Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan data berdistribusi normal jika signifikansi > 0,05 dan data tidak berdistribusi normal jika signifikansi < 0,05. Berikut hasil pengujian normalitas.

**Tabel Uji normalitas (Kolmogorov Smirnov)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0695020
	Std. Deviation	.95694190
Most Extreme Differences	Absolute	.054
	Positive	.034
	Negative	-.054
Test Statistic		.054
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: output SPSS v 22 (Diolah Peneliti, 2024)

Dari tabel diatas berdasarkan uji normalitas data menggunakan Kolmogorov Smirnov dari data yang terdapat pada penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang dimana apabila nilai tersebut dianalisa maka lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$) sehingga disimpulkan bahwa data yang terdapat pada kedua variabel penelitian dinyatakan berdistribusi normal.

2. Uji Hipotesis

a. Uji t (persial)

Uji statistik t atau uji parsial digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen secara langsung dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai t_{hitung} lebih besar dari t tabel, maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen secara langsung berpengaruh

positif terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $t < 0,05$, maka dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun langkah-langkah pengujiannya yaitu :

H_0 : Tidak ada pengaruh secara langsung dan signifikan Keterbukaan Informasi Terhadap Good Governance

H_a : Ada pengaruh secara langsung dan signifikan Partisipasi Masyarakat Terhadap Good Governance

Dasar pengambilan keputusan (Sugiyono, 2019:248) adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu :

Jika angka probabilitas sig > 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika angka probabilitas sig < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Tabel Uji t (persial)

Model	Coefficients ^a		t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.501	1.172		7.250	.000
	Keterbukaan informasi	-.209	.071	-.282	-2.956	.004
	Partisipasi masyarakat	.563	.088	.614	6.428	.000

a. Dependent Variable: *Good governance*

Dari tabel diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai signifikan seberapa besar pengaruh keterbukaan informasi adalah sebesar $0,004 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-2,956 > 1,662$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh signifikan yang diberikan oleh variabel keterbukaan informasi terhadap *Good Governance*.
- Nilai signifikan seberapa pengaruh adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6,428 > 1,662$, sehingga dapat

disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh signifikan yang diberikan oleh variabel partisipasi masyarakat terhadap *Good Governance*.

2. Uji f (simultan)

Uji f bertujuan untuk mencari apakah variabel independent secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Uji f dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Tabel Uji f (simultan) variabel keterbukaan informasi (X1) dan Partisipasi masyarakat (X2) terhadap *Good Governance* (Y)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	31.623	2	15.812	16.879	.000 ^b
	Residual	81.499	87	.937		
	Total	113.122	89			

a. Dependent Variable: *Goodgovernance*

b. Predictors: (Constant), Partisipasi masyarakat, Keterbukaan informasi

Nilai F

Nilai sig $0.000 < 0.05$

Nilai f hitung $> f_{tabel}$

F hitung $16.879 > 3.10$

Berdasarkan tabel 25 hasil uji f (simultan) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh keterbukaan informasi (X1) dan partisipasi masyarakat (X2) terhadap *Good Governance* (Y) adalah $0.000 < 0.05$ dan nilai f hitung $16.879 > f_{tabel}$ 3.10 artinya terdapat pengaruh keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat terhadap *Good Governance*.

3. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih variabel independent terhadap variabel dependen. Mencari kemungkinan kesalahan serta menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independent baik secara parsial maupun secara simultan, uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui keadaan (naik turunnya) variabel dependen jika dua atau lebih variabel independent mengalami perubahan (*Sugiyono, 2017:243*).

Tabel Uji Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	8.501	1.172		7.250	.000
	Keterbukaan informasi	-.209	.071	-.282	-2.956	.004
	Partisipasi masyarakat	.563	.088	.614	6.428	.000

a. Dependent Variable: *Good Governance*

Sumber: output SPSS v 22 (Diolah Peneliti, 2024)

Untuk membuat persamaan uji regresi linier berganda yang digunakan adalah :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2$$

$$Y = 8,501 + -0,209 x_1 + 0,563 x_2$$

Good Governance = 8,501 (nilai konstant) + -0,209 (Keterbukaan Informasi) + 0,563 (Partisipasi Masyarakat). Hasil intepretasinya ialah:

- a. Nilai 8,501 menyatakan bahwa artinya jika adanya pengaruh dari variabel keterbukaan informasi (X1) dan partisipasi masyarakat (X2), maka *Good Governance* akan tetap konstant sebesar 8,501.
- b. Nilai -0,209 artinya jika adanya pengaruh keterbukaan informasi, maka peningkatan *Good Governance* akan bertambah sebesar -0,209.
- c. Nilai 0,563 artinya jika adanya pengaruh partisipasi masyarakat (x2), maka *Good Governance* akan bertambah sebesar 0,563.

4. Uji Koefisien Determinasi

Tabel Analisis Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.411 ^a	.169	.149	1.19125

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Keterbukaan informasi

b. Dependent Variable: *Good Governance*

Agar memahami berapa tinggi presentasi variabel dependen, menggunakan rumus koefisien determinasi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 KD &= r^2 \times 100\% \\
 &= 0,169 \times 100\% \\
 &= 16,9\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel diketahui nilai R adalah 0,411 dan R *Squer* sebesar 0,169. Jadi menurut hasil Koefisen determinasi adalah 16,9%. Sehingga pengaruh keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat terhadap *Good Governance* sebesar 16,9%.

Pembahasan

Besarnya Pengaruh keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat terhadap *Good Governance* pada Kantor Camat Sako Kota Palembang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Keterbukaan Informasi dan partisipasi Masyarakat pada Kantor Camat Sako Kota Palembang. Dimana dalam penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar pengaruh positif terhadap *Good Governance* di kantor camat sako kota Palembang. Kemudian dilakukan pengujian intruemn penelitian yaitu uji validitas dan reliabilitas yang dilanjutkan dengan uji normalitas. Setelah melakukan serangkaian pengujian tersebut, maka layak dilanjutkan dan dilakukan analisis regresi linier berganda dengan melaksanakan pengujian hipotesis dengan uji signifikansi regresi persial (uji t), regresi simultan uji (f) dan analisis koefisien determinasi. Berdasarkan uji validitas dari ketiga variabel penelitian dapat diketahui, dalam penelitian ini pengujian validitas dilakukan

Koefisien determinasi (R) adalah pengujian untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel dependen atau juga untuk mengetahui seberapa besar presentasi variabel dependen. Menurut Sugiyono (2017:257) analisis koefisien determinasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = koefisien determinasi

R = koefisien korelasi

terhadap 90 responden. Pengambilan Keputusan berdasarkan r hitung (*corrected item -total correlation*) r_{tabel} sebesar 0,207 untuk $df = (n-2) = 90-2 = 88$, dengan nilai signifikansi 0,05 dan dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan Keputusan untuk uji validitas. Berdasarkan hasil uji validitas dari masing-masing angket pada ketiga variabel penelitian yaitu pengaruh Keterbukaan Informasi (X1), Partisipasi Masyarakat (X2) dan *Good Governance* (Y) disimpulkan bahwa seluruh butir angket pernyataan bersifat valid karena r hitung $> 0,207$ (r tabel).

Pengaruh Keterbukaan informasi terhadap *Good Governance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial keterbukaan informasi secara signifikan memberikan pengaruh kepada *Good Governance*, hal ini dibuktikan dengan hasil nilai koefisien regresi untuk pengaruh keterbukaan informasi terhadap *Good Governance* yaitu -0,209 dan juga dibuktikan dari hasil signifikan untuk pengaruh keterbukaan informasi terhadap *Good Governance* adalah sebesar $0,004 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan yang diberikan oleh variabel XI (keterbukaan informasi) terhadap variabel Y (*Good Governance*).

Untuk hipotesis penelitian ini adalah H_a , yaitu dimana terdapat pengaruh dan signifikan antara keterbukaan informasi terhadap *Good Governance* pada kantor camat sako kota Palembang, hal ini dapat diketahui dari nilai signifikan t_{hitung} yang bernilai tinggi dari standar signifikansi regresi sebesar $0,05$ yaitu $-2,956 > 1,662$.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Good Governance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Partisipasi Masyarakat secara signifikan memberikan pengaruh kepada *Good Governance*, hal ini dibuktikan dengan hasil nilai koefisien regresi untuk pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap *Good Governance* yaitu 0,563 dan juga dibuktikan dari hasil signifikan untuk pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap *Good Governance* adalah sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan yang diberikan oleh variabel X2 (Partisipasi Masyarakat) terhadap variabel Y (*Good Governance*).

Untuk hipotesis penelitian ini adalah H_a , yaitu dimana terdapat pengaruh dan signifikan antara keterbukaan informasi terhadap *Good Governance* pada kantor camat sako kota Palembang, hal ini dapat diketahui dari nilai signifikan t hitung yang bernilai tinggi dari standar signifikansi regresi sebesar $0,05$ yaitu $6,428 > 1,662$.

Pengaruh Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Good Governance

Secara keseluruhan, hasil penelitian tentang pengujian pengaruh keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat terhadap *Good Governance* pada Kantor Camat Sako Kota Palembang menyatakan pengaruh yang positif. Hal ini berdasarkan tabel summary yang menunjukkan nilai koefisien determinasi atau r square sebesar 0,169.

Untuk hipotesis penelitian ini adalah H_a : terdapat pengaruh keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat secara simultan (bersama-sama) terhadap *Good Governance* pada kantor camat sako kota Palembang, hal ini dapat diketahui dari nilai p-value f statistic untuk variabel keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat menunjukkan angka 16.879, yang bernilai yang bernilai kecil dari standar signifikansi regresi sebesar $0,05$ yaitu $0,000$ dan juga terbukti dari hasil uji regresi berganda, yaitu $Y = 8,501 + ,209 X1 + 0,563 X2$, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap *Good Governance* pada kantor camat sako kota Palembang. Dengan demikian Hipotesis (H_a) dalam pengujian ini diterima atau keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif terhadap *Good Governance* pada Kantor Camat Sako Kota Palembang.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang didapat dari kantor camat sako kota Palembang, sehingga bisa diambil simpulan :

1. Terdapat Pengaruh Keterbukaan Informasi secara signifikansi (parsial) terhadap *Good Governance* Pada Kantor Camat Sako Kota Palembang. Besarnya pengaruh Keterbukaan informasi terhadap *Good Governance* ialah -2.956. hal ini ditunjukkan dengan hasil signifikan bagi pengaruh keterbukaan informasi ialah nilai $0,004 < 0,05$ dan hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-2,956 > 1,662$, maka bisa disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan diberikan oleh variabel *Good Governance*.
2. Terdapat pengaruh partisipasi masyarakat secara signifikansi (parsial) terhadap *Good Governance* pada kantor camat sako kota Palembang. besarnya pengaruh partisipasi Masyarakat terhadap *Good Governance* ialah 6,428. hal ini ditunjukkan dengan hasil signifikan bagi pengaruh partisipasi masyarakat ialah nilai $0,000 < 0,05$ dan hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6,428 > 1,662$, maka bisa disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan diberikan oleh variabel *Good Governance*.
3. Terdapat pengaruh keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat secara simultan (bersama-sama). Besarnya pengaruh keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat terhadap *Good Governance* ialah 16.879. Hal ini dibuktikan dengan nilai uji f simultan signifikansi $0,000 < 0,05$ dan hasil f hitung $> f$ tabel ialah $16,879 > 3,10$.

Dalam penerapan Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap *Good Governance* Pada Kantor Camat Sako Kota Palembang telah menerapkan Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Masyarakat yang berpengaruh positif terhadap *Good Governance* yang ada di kantor Camat Sako Kota Palembang telah dilaksanakan dengan baik, sebagaimana dengan Visi dan Misi Kantor Camat Kecamatan Sako Kota Palembang.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, penulis mengajukan saran-saran yang dapat diberikan agar keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat berjalan lebih baik :

1. Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap *Good Governance* pada Kantor Camat Sako Kota Palembang telah dilaksanakan dengan baik. Kembangkan portal online

- yang menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang kegiatan dan kebijakan.
2. Diharapkan Kantor Camat Sako Kota Palembang dapat mempertahankan pelaksanaan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dengan baik dan semakin baik lagi, sehingga masyarakat merasa lebih puas dalam menerima keterbukaan informasi yang diberikan oleh Kantor Camat Sako Kota Palembang.
 3. Diharapkan agar dapat mengadakan program pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya *good governance*, hak-hak mereka untuk mendapatkan informasi, dan cara terbaik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi mobile dan media sosial untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam diskusi dan pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Edwards, George. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Isbandi. W. 2007. *Partisipasi Masyarakat*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Labolo, M. 2011. *Birokrasi Dalam Era Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sastro, Dhoho A, et.al. 2010. *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju
- _____. 2012. *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik" Bagian Kedua Edisi Revisi Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, Agus, Sugiana, Dadang dan Narotama, Jimi. "Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Bandung kepada Warga.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi, dkk. 2023. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Palembang. STIA Satya Negara

Sumber Lain :

- Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 3. 2014. hal 26-29.
- Kamaliah, Khairunnisa. "Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Samarinda". eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 3. 2015 hal 10-11 Kota. Bandung". Jurnal Ilmu Komunikasi Volume. 1. (Desember, 2013), hal 9-10.
- Prabowo, Rizki Dwi. "Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya menciptakan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik: